



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi guna pemerataan akses dan mutu pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Diseases (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
5. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
6. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

- menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri.
 9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
 10. Nilai Kelulusan adalah rata-rata nilai rapor lima semester terakhir ditambah nilai semester genap kelas VI SD/MI.
 11. Mekanisme dalam jaringan (daring) adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempergunakan fasilitas internet.
 12. Mekanisme luar jaringan (luring) adalah penerimaan peserta didik baru dengan tanpa mempergunakan fasilitas internet.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan: dan

- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 huruf a.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) atau SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6; dan

- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orangtua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- b. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari kepala dusun atau kepala lingkungan yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memiliki 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 15

Zonasi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 16

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 18

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai kelulusan berdasarkan rata-rata nilai lima semester terakhir ditambah dengan nilai Ujian Sekolah kelas VI SD/MI;
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni.

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring) dan PPDB SD dilaksanakan dengan mekanisme luar jaringan (luring).
- (2) Pendaftar PPDB SMP yang kesulitan mendaftar dengan mekanisme dalam jaringan (daring) dapat dibantu oleh operator sekolah.
- (3) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mekanisme luar jaringan (luring) harus memastikan pelaksanaan PPDB mematuhi protokol kesehatan.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD

mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
 - (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 25

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

- (3) Dinas Pendidikan dalam hal melaksanakan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menginformasikan sekolah terdekat yang masih kekurangan calon peserta didik.
- (4) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (5) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 26

- (1) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Apabila masih terdapat kekurangan jumlah siswa dari daya tampung yang tersedia maka dapat membuka pendaftaran pada tahap dua.

Pasal 27

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Pasal 28

Perhitungan pembobotan PPDB SD jalur zonasi dan jalur perpindahan orangtua/wali serta Perhitungan pembobotan PPDB SMP jalur zonasi dan jalur perpindahan orangtua/wali dan prestasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 29

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 30

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG

Pasal 31

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 32

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;dan

- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima SMP di Daerah setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 34

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 36

- (1) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB ke Kementerian melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 37

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VI SANKSI

Pasal 38

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17; dan
 - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
- dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Juni 2020

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP.19701022 199803 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 18 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**I. SEKOLAH DASAR**

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
1	UPT SDN 030277 SIDIKALANG	2	Sidikalang
2	UPT SDN 030279 SIDIKALANG	3	Sidikalang
3	UPT SDN 030280 SIDIKALANG	2	Sidikalang
4	UPT SDN 030281 SIDIKALANG	1	Batang Beruh
5	UPT SDN 030284 SIDIKALANG	1	Sidikalang Kalang Simbara
6	UPT SDN 030285 SIDIKALANG	2	Kuta Gambir Huta Rakyat Karing
7	UPT SDN 030286 PARSAORAN	1	Bintang
8	UPT SDN 030287 BATANG BERUH	2	Batang Beruh
9	UPT SDN 030288 BATANG BERUH	1	Batang Beruh
10	UPT SDN 030300 PANSURAN	1	Bintang Hulu Kalang Simbara
11	UPT SDN 030301 HUTA RAJA	2	Huta Rakyat
12	UPT SDN 030306 BARISAN NAULI	1	Batang Beruh
13	UPT SDN 033911 BELANG MALUM	1	Belang Malum
14	UPT SDN 033912 HUTA GAMBIR	2	Kuta Gambir Huta Rakyat Karing
15	UPT SDN 033913 KALANG BARU	2	Kalang Lae Nuaha
16	UPT SDN 033914 BINTANG	2	Bintang Mersada
17	UPT SDN 034779 SIDIANGKAT	2	Sidiangkat
18	UPT SDN 034781 BATANG BERUH	2	Batang Beruh
19	UPT SDN 034782 TRIKORA	2	Huta Rakyat Kalang Sidikalang

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
20	UPT SDN 035935 PANCURAN	1	Bintang Hulu
21	UPT SDN 037145 LAE PINANG	1	Bintang
22	UPT SD INPRES KALANG SIMBARA	1	Kalang Simbara
23	UPT SDN 030331 SUMBUL	1	Pegagan Julu I Pegagan Julu II
24	UPT SDN 030332 SUMBUL	1	Pegagan Julu I Pegagan Julu II
25	UPT SDN 030333 SUMBUL	1	Pegagan Julu I Pegagan Julu II
26	UPT SDN 030334 TELADAN SUMBUL	1	Pegagan Julu I Pegagan Julu II Pegagan Julu III
27	UPT SDN 030335 BATANGARI	2	Pegagan Julu IX
28	UPT SDN 030336 BATANGARI	1	Pegagan Julu X
29	UPT SDN 030337 BATANGARI	1	Pegagan Julu VIII
30	UPT SDN 030339 TANJUNG BERINGIN	1	Tanjung Beringin Tanjung Beringin I
31	UPT SDN 030340 TANJUNG BERINGIN	2	Pegagan Julu I Tanjung Beringin
32	UPT SDN 030345 HUTA GUGUNG	2	Kuta Gugung
33	UPT SDN 030346 HUTA GUGUNG	2	Pegagan Julu V
34	UPT SDN 030347 BANGUN JUMALA	1	Pegagan Julu II
35	UPT SDN 030348 LAE TANGGIANG	2	Pegagan Julu VI
36	UPT SDN 030349 PARBUAHAN	1	Pegagan Julu VI Pegagan Julu VII
37	UPT SDN 030350 HUTA MANIK	1	Pegagan Julu VI
38	UPT SDN 030351 HUTA MANIK	1	Pegagan Julu VII Pegagan Julu VIII
39	UPT SDN 030352 SIPALIPALI	1	Pegagan Julu VII
40	UPT SDN 030353 SILEUH-LEUH	1	Sileuh-leuh Parsaoran Pegagan Julu V
41	UPT SDN 030354 BULUH UJUNG	1	Buluh Ujung Pegagan Julu IV
42	UPT SDN 030355 PARRATUSAN	1	Pegagan Julu III
43	UPT SDN 030356 TANJUNG BERINGIN	1	Tanjung Beringin Pegagan Julu IV
44	UPT SDN 033923 SUMBUL	1	Sumbul
45	UPT SDN 033924 INVALIDEN	1	Pegagan Julu I Pegagan Julu II

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
46	UPT SDN 034794 LAE RIAS	1	Perjuangan
47	UPT SDN 034795 TUMPAK DEBATA	1	Pegagan Julu IV
48	UPT SDN 034797 PARSAORAN	1	Pegagan Julu VII Simartugan
49	UPT SDN 034798 PANGGURUAN	1	Pangguruan
50	UPT SDN 034799 DOLOK TOLONG	2	Dolok Tolong
51	UPT SDN 034800 BATANGARI	1	Pegagan Julu IX
52	UPT SDN 035936 PARGAMBIRAN	2	Pargambiran Pegagan Julu IV
53	UPT SDN 035937 TANJUNG BERINGIN	2	Tanjung Beringin I
54	UPT SDN 036562 PONJIAN	1	Pegagan Julu X
55	UPT SDN 037147 POLTAK BINTANG	1	Sileuh-leuh Parsaoran
56	UPT SDN 037148 SONGSANG	1	Pegagan Julu VII
57	UPT SDN 037991 LANCANG	1	Pegagan Julu III Dolok Tolong
58	UPT SDN 037992 LAE PINAGAR	1	Perjuangan
59	UPT SD NEGERI BARISAN NAULI	1	Barisan Nauli
60	UPT SDN 030307 TIGALINGGA	1	Lau Sireme Gunung Tua Tigalingga
61	UPT SDN 030308 TIGALINGGA	1	Tigalingga Gunung Tua Lau Sireme Lau Bagot Sarintonu
62	UPT SDN 030310 TIGALINGGA	1	Lau Bagot Sarintonu Palding Lau Sireme
63	UPT SDN 030312 LAU MIL	1	Laumil Batu Gungun
64	UPT SDN 030315 LAU MOLGAP	1	Lau Molgap
65	UPT SDN 030316 SUKANDEBI	2	Sukandebi
66	UPT SDN 030317 GUNUNG SAYANG	1	Palding Jaya Sumbul Palding
67	UPT SDN 030318 BERTUNGEN	1	Bertungen Julu Palding
68	UPT SDN 030319 SUMBUL KARO	1	Palding Jaya Sumbul Sumbul Tengah

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
69	UPT SDN 030320 LAU PANGGUH	1	Jumagerat Ujung Teran Sarintonu
70	UPT SDN 030321 SIBENKURUNG	1	Jumagerat
71	UPT SDN 030322 UJUNG TERAN	1	Ujung Teran
72	UPT SDN 033917 BARISAN TIGOR	1	Lau Bagot Tigalingga Gunung Tua Lau Sireme Palding
73	UPT SDN 033918 RAMBAH SERIT	1	Lau Sireme
74	UPT SDN 034786 LAU PAKPAK	1	Lau Pakpak
75	UPT SDN 034787 UJUNG PARIRA	1	Sumbul Tengah Bukit Baru
76	UPT SDN 034789 MATANARI	1	Ujung Teran
77	UPT SDN 034790 SARINTONU	1	Sarintonu
78	UPT SDN 034791 TANJUNG BERINGIN	1	Bertungen Julu Tanjung Beringin
79	UPT SDN 037156 LAU MIL	1	Laumil
80	UPT SDN 037995 LAU PAMULUTAN	1	Lau Molgap Soban
81	UPT SDN 037996 TORNAULI	1	Jumagerat Ujung Teran
82	UPT SDN 030439 LAU MECIHO	1	Harapan Gunung Tua Sarintonu
83	UPT SD INPRES KUTAMBARU	1	Harapan
84	UPT SDN 030441 PAMAH	1	Pamah
85	UPT SDN 030442 PAMAH	1	Pamah
86	UPT SDN 034820 LAU PETUNDAL	1	Pamah
87	UPT SDN 030438 TANAH PINEM	1	Lau Tawar
88	UPT SDN 033921 SIMBETEK	1	Tanah Pinem
89	UPT SDN 034818 BUTAR	1	Balandua
90	UPT SDN 030437 KUTABULUH	1	Kuta Buluh
91	UPT SDN 034823 KUTABULUH	1	Kuta Buluh
92	UPT SDN 034819 LIREN	1	Kuta Gamber
93	UPT SDN 034821 PASIR TENGAH	1	Pasir tengah
94	UPT SDN 038096 PASIR MBELANG	1	Pasir Mbelang
95	UPT SDN 034822 TAMBANG TIMAH	1	Lau Primbon
96	UPT SDN 035938 RENUN	2	Renun Alur Subur

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
97	UPT SDN 035940 MANGAN MOLIH	1	Mangan Molih
98	UPT SD INPRES LIANG JERING	1	Liang Jering
99	UPT SDN 037999 JUMA BATU	2	Suka Dame
100	UPT SDN 030440 LAU PERIMBON	1	Lau Perimbon
101	UPT SDN 035939 KEMPAWA	1	Kempawa Kempawa
102	UPT SDN 037158 LAU NJUHAR	1	Lau Njuhar I
103	UPT SDN 037729 SINAR PAGI	1	Sinar Pagi
104	UPT SDN 030357 ADIAN NANGKA	1	Adiangupa
105	UPT SDN 030358 KERAJAAN	1	Juma Siulok
106	UPT SDN 030359 ADIAN NANGKA	1	Adiannangka
107	UPT SDN 030361 GOMIT	1	Gomit
108	UPT SDN 030363 SIHORBO	1	Sihorbo
109	UPT SDN 030364 BATU DONGKOL	1	Sinampang
110	UPT SDN 030372 SOBAN	1	Soban
111	UPT SDN 030373 GUNUNG GAJAH	1	Jumantuang
112	UPT SDN 030374 JUMANTUANG	1	Jumantuang
113	UPT SDN 030384 KANOPAN	2	Sosor Lontung
114	UPT SDN 030385 ANTUANG	1	Hutaimbaru
115	UPT SDN 030387 BUNTU RAJA	1	Adian gupa Jumasiulok Bunturaja
116	UPT SDN 033925 SINAMPANG	1	Sinampang
117	UPT SDN 033926 SOBAN	1	Soban
118	UPT SDN 034807 JUMATEGUH	2	Jumateguh
119	UPT SDN 035942 GOMIT	1	Jumateguh Gomit
120	UPT SDN 036565 LUMBAN SINAMBELA	1	Sosor lontung Pangaribuan
121	UPT SDN 037153 TORNAULI	1	Maju Soban
122	UPT SDN 037154 SOBAN	1	Soban Pandan
123	UPT SDN 038094 ADIAN PARA-PARA	1	Adiangupa
124	UPT SDN 030388 PARONGIL	1	Parongil
125	UPT SDN 030391 PARONGIL	1	Urukblin Bakal Gajah
126	UPT SDN 030392 PARONGIL	1	Tungtung Batu Lokkotan
127	UPT SDN 030394 BONIAN	1	Bonian

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
128	UPT SDN 030395 GUMUNTUR	1	Sumbari
129	UPT SDN 030396 GUMUNTUR	1	Lae Panginuman Sumbari
130	UPT SDN 030397 LAE SULPI	1	Lae Ambat Lae Pangaroan
131	UPT SDN 030398 LAE RAMBONG	1	Lae Rambong
132	UPT SDN 030399 PALIPI	1	Palipi Lumban Toruan
133	UPT SDN 033929 HUTA GINJANG	1	Polling Anak Anak Lumban Toruan
134	UPT SDN 033930 PARONGIL	2	Parongil
135	UPT SDN 034808 BAKAL GAJAH	1	Bakal Gajah
136	UPT SDN 034809 LOKKOTAN	2	Lokkotan
137	UPT SDN 034810 SIBORAS	1	Siboras Urukblin
138	UPT SDN 034812 SIRATA	1	Siratah
139	UPT SDN 035947 LAE AMBAT	1	Lae Ambat
140	UPT SDN 037155 BONGKARAS	1	Bongkaras
141	UPT SDN 038097 LAE PANGAROAN	1	Lae Pangaroan
142	UPT SDN 030291 BANGUN	1	Bangun I Sitinjo I
143	UPT SDN 030292 LAE HOLE	2	Lae Hole Bangun
144	UPT SDN 030293 LAE HOLE	1	Sitinjo Lae Hole II
145	UPT SDN 030294 SIGALINGGING	2	Parbuluan IV
146	UPT SDN 030295 SITO HANG	1	Parbuluan IV
147	UPT SDN 030296 PARBAKALAN	1	Parbuluan III
148	UPT SDN 030297 PARBULUAN	2	Parbuluan I Parbuluan II Parbuluan V
149	UPT SDN 030298 SIMALLOPUK	2	Parbuluan I
150	UPT SDN 030299 PARBULUAN-SIHOTANG	1	Parbuluan VI
151	UPT SDN 033916 SIARUNGARUNG	1	Lae Hole I Lae Hole
152	UPT SDN 034780 PANGIRINGAN	2	Parbuluan V Parbuluan III
153	UPT SDN 034783 BANGUN	2	Bangun Bangun I

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
154	UPT SDN 036561 SIGALINGGING	2	Parbuluan IV
155	UPT SDN 037146 LAE HOLE	1	Lae Hole
156	UPT SDN 037990 SIBIRA	1	Parbuluan VI
157	SDN LUMBAN JULU	1	Parbuluan II
158	SDN BARISAN NAINGGOLAN	1	Parbuluan III
159	UPT SDN 030376 BAKAL JULU	1	Bakal Julu
160	UPT SDN 030377 BAKAL JULU	1	Sipoltong
161	UPT SDN 030378 TUALANG	1	Tualang
162	UPT SDN 030379 BAKAL JULU	1	Bakal Julu Pangaribuan
163	UPT SDN 030380 PANDAN	1	Pandan
164	UPT SDN 030381 SILUMBOYAH	2	Silumboyah Sigambir-gambir Gunung Meriah
165	UPT SDN 030383 PANGKIRISAN	1	Kuta Tengah
166	UPT SDN 030386 SUNGAI RAYA	2	Sungai Raya
167	UPT SDN 033927 LAE MEANG	1	Lae Nuaha
168	UPT SDN 034803 TAMBAHAN	1	Tambahan
169	UPT SDN 034804 PANGARIBUAN	1	Pangaribuan Sipoltong
170	UPT SDN 035941 GUNUNG MERIAH	1	Gunung Meriah
171	UPT SDN 036410 KM.11	1	Silumboyah
172	UPT SDN 036564 KUTADELLENG	1	Sungai Raya Tambahan
173	UPT SDN 037150 SIGAMBIR-GAMBIR	1	Sigambir-gambir
174	UPT SDN 037994 JUMA BORNO	1	Sungai Raya
175	UPT SDN 030365 LAE LONGKI	1	Janji
176	UPT SDN 030366 Pardamean	1	Janji Simungun Lae Sering
177	UPT SDN 030367 SIMUNGUN	1	Simungun
178	UPT SDN 030368 JAMBUR INDONESIA	1	Jambur Indonesia
179	UPT SDN 030369 PARDOMUAN	1	Pardomuan
180	UPT SDN 030370 LAE LUHUNG	1	Lae Luhung Lae Itam
181	UPT SDN 030371 LAE LOGAN	1	Lae Luhung Lae Haporas
182	UPT SDN 034801 LAE ITAM	1	Lae Itam Lae Rambong

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
183	UPT SDN 034802 LAE MARKELANG	2	Lae Markelang Lae Haporas
184	UPT SDN 034805 SOPOBUTAR	1	Sopobutar
185	UPT SDN 034806 LAE SERING	1	Lae Sering
186	UPT SDN 037152 KUTA KARANGAN	1	Janji
187	UPT SDN 038095 BARISAN SIRAIT	1	Pardomuan
188	UPT SD INPRES AEK NAULI	1	Lae Markelang
189	UPT SDINPRES LAE KABERUN	1	Lae Itam
190	UPT SDN 030323 BUKIT TINGGI	2	Bukit Tinggi Mbinanga
191	UPT SDN 030324 TANJUNG SALUKSUK	1	Perrik Mbue Tanjung Saluksuk
192	UPT SDN 030325 SIMANDUMA	1	Simanduma
193	UPT SDN 030326 TIGALAMA	1	Onan lama
194	UPT SDN 030327 LAKSA	1	Laksa
195	UPT SDN 030328 BANDAR HUTA USANG	1	Bandarhutausang
196	UPT SDN 030329 KEBUN SIBABI	2	Lingga Raja II Kuta Usang Lingga Raja
197	UPT SDN 030330 PISPIS	1	Bandarhutausang
198	UPT SDN 034788 SALUKSUK	1	Perrik Mbue Tanjung Saluksuk
199	UPT SDN 034792 SIMARTUGAN JEHE	1	Onan lama
200	UPT SDN 034793 JUMAMBALNO	1	Simartugan
201	UPT SDN 035950 SILENCER	1	Simartugan
202	UPT SDN 036571 PARSIROAN	1	Bukit Baru
203	UPT SDN 036572 LINGGA RAJA	1	Lingga Raja
204	UPT SD INPRES KUTA USANG	1	Kutausang
205	UPT SDN LINGGA TENGAH	1	Lingga Raja II
206	UPT SD NEGERI SUKAMARI	1	Linggaraja
207	UPT SDN 030400 SEMPUNG	1	Lumban Sihite
108	UPT SDN 030403 PANDIANGAN	1	Pandiangan
209	UPT SDN 030404 BULUDURI	2	Buluduri
210	UPT SDN 030405 BULUDURI	2	Sempung Polling
211	UPT SDN 030407 LAEPARIRA	1	Lae Parira
212	UPT SDN 030408 KENTARA	2	Kentara
213	UPT SDN 030409 SUMBUL	1	Sumbul
214	UPT SDN 030410 KABANJULU	1	kaban Julu
215	UPT SDN 033928 SIDUMPE	1	Sempung Polling
216	UPT SDN 034811 BULUDURI	1	Buluduri

NO	NAMA SD	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
217	UPT SDN 035948 GULANGAN	1	Pandiangan Sempung Polling
218	UPT SDN 036409 LUMBANTORUAN	1	Lumban Toruan
219	UPT SDN 036569 HUTALOBU	1	Kentara
220	UPT SDN 030313 GUNUNG SITEMBER	1	Gunung Sitember
221	UPT SDN 030314 BUKIT KARO	2	Bukit Lau Kersik Batu Gun Gun
222	UPT SDN 033920 RANTEBESI	2	Tupak Raja Rante Besi
223	UPT SDN 034785 BATUGUNGUN	1	Tupak Raja Batu Gun Gun
224	UPT SDN 035949 GUNDALING	1	Gundaling
225	UPT SDN 035951 BULUH MENGKAL	1	Rante Besi Lau Lebah
226	UPT SDN 037157 KENDET LIANG	1	Kendet Liang
227	UPT SDN LAU PENGKERUKEN	1	Dusun Gundaling
228	SDN LAU LEBAH	1	Lau Lebah
229	UPT SDN 030302 KARING	1	Karing
230	UPT SDN 030303 BERAMPU	1	Berampu Karing Sumbul
231	UPT SDN 030304 SUMBUL BERAMPU	1	Berampu Karing Sumbul
232	UPT SDN 030305 SAMBALIANG	1	Sambaliang
233	UPT SDN 033915 PASI	1	Pasi
234	UPT SDN 034778 KARING	1	Karing
235	UPT SD INPRES BANJAR TOBA	1	Banjar Toba Karing
236	UPT SDN 030341 SILALAH I	1	Silalahi III
237	UPT SDN 034796 SILALAH I	1	Salalahi I
238	UPT SDN 030342 SILALAH I	1	Silalahi II
239	UPT SDN 030344 PAROPO	1	Paropo I Paropo
240	UPT SDN 033922 PAROPO	1	Paropo I
241	UPT SDN 030343 BINANGARA	1	Silalahi II
242	UPT SDN 030289 PANJI	3	Sitinjo II Sitinjo
242	UPT SDN 030290 PUNGUAN NAULI	3	Sitinjo
243	UPT SDN 034784 PANJI DABUTAR	2	Panji Dabutar

II. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
1	SMP NEGERI 1 SIDIKALANG	10	Sidikalang Batang Beruh Sidiangkat Kuta Gambir Bintang Hulu Hutaimbaru Bintang Kalang Simbara Kalang Belang Malum Karing Huta Rakyat Bintang Mersada
2	SMP NEGERI 2 SIDIKALANG	9	Sidikalang Batang Beruh Sidiangkat Kuta Gambir Bintang Hulu Hutaimbaru Bintang Kalang Simbara Kalang Belang Malum Karing Huta Rakyat Bintang Mersada
3	SMP NEGERI 3 SIDIKALANG	7	Sidikalang Batang Beruh Sidiangkat Kuta Gambir Panji Dabutar Hutaimbaru Bintang Hulu Bintang Kalang Simbara Kalang Baru Belang Malum Karing Huta Rakyat Bintang Mersada Sitinjo II
4	SMP NEGERI 1 SITINJO	4	Sitinjo Sitinjo I Sitinjo II Panji Dabutar Bangun Bintang Hulu Kel. Batang Beruh

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
5	SMP NEGERI 1 SUMBUL	8	Pegagan Julu I Pegagan Julu III Pegagan Julu V Pegagan Julu VI Pegagan Julu VII Pegagan Julu VIII Kuta Gugung Pangguruan
6	SMP NEGERI 2 SUMBUL	5	Tanjungberingin Tanjungberingin 1 Doloktolong Pegagan Julu VII Pejuangan Pargambiran Barisan Nauli Pegagan Julu II Pegagan Julu I
7	SMP NEGERI 3 SUMBUL	6	Pegagan Julu I Pegagan Julu II Pegagan Julu III Pegagan Julu IV Pegagan Julu V Pegagan Julu VI Pegagan Julu VII Dolok Tolong
8	SMP NEGERI 4 SUMBUL	4	Pegagan Julu VII Pegagan Julu VIII Pegagan Julu IX Pegagan Julu X
9	SMP NEGERI 5 SUMBUL	3	Sileuleuh Parsaoran Pargambiran Pegagan Julu V Parbuluan VI Barisan Nauli Perjuangan
10	SMP NEGERI 1 SILAHISABUNGAN	3	Silalahi I Silalahi II Silalahi III Paropo Paropo I
11	SMP NEGERI 1 PARBULUAN	6	Bangun Bangun I Lae Hole Lae Hole II Sitinjo Sitinjo I Lae Hole I Parbuluan IV
12	SMP NEGERI 2 PARBULUAN	3	Parbuluan I Parbuluan II Parbuluan III Parbuluan IV Parbuluan V Parbuluan VI

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
13	SMP NEGERI 3 PARBULUAN	3	Parbuluan I Parbuluan II
14	SMP NEGERI 1 BERAMPU	6	Karing Pasi Banjar Toba Sambaliang Hutaimbaru Sumbul Hutarakyat Berampu
15	SMP NEGERI 1 LAE PARIRA	7	Lae Parira Buluduri Sempung Polling Kentara Sumbul Lumban Sihite Lumban Toruan Pandiangan Kabanjulu Jumateguh
16	SMP NEGERI 1 SILIMA PUNGGAPUNGGGA	7	Parongil Polling Anak-anak Longkotan Bonian Tungtung Batu Bongkaras Siboras Sirata Urukblin Palipi Lumbantoruan
17	SMP NEGERI 2 SILIMA PUNGGAPUNGGGA	3	Lae Ambat Lae Pangaroan Lae Panginuman Sumbari Bakal Gajah
18	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU	5	Bunturaja Juma Siulok Adian Gupa Adian Nangka Gomit Soban Jumatuang Sinampang Jumateguh
19	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU	4	Sosorlotung Kuta Tengah Kabanjulu Juma Teguh Desa Maju Jumantuang
20	SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU	4	Adiannangka Sihorbo Sinampang Maju

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
21	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HILIR	5	Janji Dea Lae Sering Simungun Lae Markelang Jambur Indonesia Bakal Gajah Urukblin
22	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HILIR	2	Sopobutar Jambur Indonesia Pardomuan Lae Rambong
23	SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU HILIR	5	Pardomuan Lae Luhung Lae Markelang Lae Itam Lae Rambong Lae Haporas Sinar Pagi
24	SMP NEGERI 1 GUNUNG SITEMBER	3	Gunung Sitember Batu Gun-gun Tupak raja Rante Besi Gundaling Kendetliang Bukit Lau Kersik Lau Lebah
25	SMP NEGERI 1 TIGALINGGA	8	Juma Gerat Lau Bagot Lau Sireme Palding Jaya Sumbul Palding Sarintonu Sukandebi Sumbul Tengah Ujung Teran Tigalingga Bertungen Julu Laumil Gunung Tua
26	SMP NEGERI 2 TIGALINGGA	6	Lau Sireme Laumil Bukit Lau Kersik Harapan Jumagerat Gunung Tua Tigalingga Batu Gun-gun
27	SMP NEGERI 3 TIGALINGGA	3	Lau Pakpak Lau Molgap Bertungen Julu Bukit Lau Kersik Soban Sukandebi

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
28	SMP NEGERI 1 TANAH PINEM	5	Kuta Buluh Pamah Balandua Kuta Gamber Lau Gunung Kempawa Lau Perimbon Suka Dame Pasir Mbelang
29	SMP NEGERI 2 TANAH PINEM	4	Tanah Pinem Lau Tawar Rante Besi Pamah Harapan Lau Perimbon Lau Lebah Gunung Tua
30	SMP NEGERI 3 TANAH PINEM	2	Pasir Mbelang Renun Sinar Pagi Pasir Tengah Mangan Molih
31	SMP NEGERI 4 TANAH PINEM	2	Lau Njuhar Liang Jering Alur Subur Pasir Mbelang
32	SMP NEGERI 1 PEGAGAN HILIR	6	Bandar Huta Usang Simartugan Onan Lama Laksa Lingga Raja Desa Bandar Hutausang Simanduma Kuta Usang Pegagan Julu VII
33	SMP NEGERI 2 PEGAGAN HILIR	2	Lingga Raja II Kuta Usang
34	SMP NEGERI 3 PEGAGAN HILIR	3	Tanjung Saluksuk Perik Mbue Onan Lama Bukit Tinggi Bukit Baru Mbinanga Sumbul Tengah
35	SMP NEGERI 1 SIEMPATNEMPU HULU	6	Bakal Julu Sipoltong Pangaribuan Silumboyah Sigambir-gambir Gunung Meriah Palding Jaya Sumbul

NO	NAMA SMP	DAYA TAMPUNG (ROMBEL)	DESA/KELURAHAN
36	SMP NEGERI 2 SIEMPATNEMPU HULU	4	Tambahan Kuta Tengah Lae Nuaha Sungai Raya Gunung Meriah Sosor Lontung
37	SMP NEGERI 3 SIEMPATNEMPU HULU	2	Pandan Tualang Gunung Gajah Jumantuang Bertungen Julu Gomit

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIANN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP.19701022 199803 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 18 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

I. PERHITUNGAN PEMBOBOTAN SEKOLAH DASAR

1. Jalur Zonasi

a. usia pendaftar

- 7 tahun atau lebih : 100
- 6 tahun : 75
- 5,6 tahun dengan surat keterangan : 50

b. apabila bobot pendaftar sama maka memprioritaskan pendaftar yang berusia lebih tinggi.

2. Jalur perpindahan orang tua dan perpindahan calon peserta didik yang menjadi tanggungan wali (lampiran surat pindah/mutasi/surat keterangan kepala desa/lurah).

Melakukan pemeringkatan usia pendaftar dengan memprioritaskan pendaftar yang berusia lebih tinggi.

3. Jalur Afirmasi

Pendaftar jalur afirmasi wajib melampirkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten dan Surat Pernyataan orangtua/wali yang menyatakan bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten.

II. PERHITUNGAN PEMBOBOTAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1. Jalur Zonasi

Bilamana pendaftar calon peserta didik baru melebihi daya tampung maka menggunakan pembobotan sebagai berikut:

- a. penentuan siswa yang diterima berdasarkan nilai rata-rata kelulusan SD/MI.
- b. apabila nilai rata-rata kelulusan sama maka memprioritaskan nilai rata-rata kelulusan mata pelajaran Matematika yang lebih tinggi dan jika masih sama memprioritaskan nilai rata-rata kelulusan mata pelajaran IPA yang lebih tinggi.

2. Jalur Prestasi

- a. Prestasi Akademis (lampirkan sertifikat atau pengumuman pemenang)
 - peringkat I OSN Kab : 300
 - peringkat II OSN Kab : 275
 - peringkat III OSN Kab : 250
 - b. rata-rata nilai kelulusan SD/MI
 - 95,01 s.d 100,00 : 300
 - 90,01 s.d 95,00 : 275
 - 85,01 s.d 90,00 : 250
 - c. Prestasi Non Akademis (lampirkan sertifikat atau pengumuman pemenang)
 - Peringkat I lomba Non Akademis Tingkat Kab : 300
 - Peringkat II lomba Non Akademis Tingkat Kab : 275
 - Peringkat III lomba Non Akademis Tingkat Kab : 250
 - d. jika bobot pendaftar jalur prestasi sama maka memprioritaskan Prestasi Akademis (a.) lalu nilai rata-rata kelulusan SD/MI (b.) dan Prestasi Non Akademis (c.).
3. Jalur Perpindahan orang tua dan perpindahan calon peserta didik yang menjadi tanggungan wali (lampiran surat pindah/mutasi/surat keterangan kepala desa/lurah).
- a. penentuan siswa yang diterima berdasarkan nilai rata-rata kelulusan SD/MI.
 - b. apabila nilai rata-rata kelulusan sama maka memprioritaskan nilai rata-rata kelulusan mata pelajaran Matematika yang lebih tinggi dan jika masih sama memprioritaskan nilai rata-rata kelulusan mata pelajaran IPA yang lebih tinggi.

4. Jalur Afirmasi

Pendaftar jalur afirmasi wajib melampirkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten dan Surat Pernyataan orangtua/wali yang menyatakan bersedia diproses hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten.

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP.19701022 199803 1 006